

Waspadai Belanja Bansos pada Kementerian Jelang Pemilu

Kebutuhan modal besar untuk memenangkan diri atau partai politik membuat banyak pihak menggunakan berbagai cara, termasuk menjadikan uang negara sebagai modal pemenangan. Menjelang pemilu 2014, masyarakat harus benar-benar mewaspadaai penggunaan APBN. Sebab, APBN rawan diselewengkan menjadi modal pemenangan pemilu. Salah satu yang paling rawan disalahgunakan adalah belanja bantuan sosial atau bansos.

APBN untuk kepentingan rakyat

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui DPR. APBN mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran dimasukkan dalam APBN.

Undang-undang APBN memandatkan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak pelak lagi, kepentingan rakyat seharusnya menjadi elemen utama dalam penyusunan dan pengelolaan APBN.

APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pendapatan negara tidak lepas dari peran rakyat. Melalui APBN, masyarakat dapat melihat apakah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan negara ini.

Namun pada kenyataannya, penyusunan dan pengelolaan APBN seringkali tersandera kepentingan banyak pihak, baik pemerintah maupun partai politik yang kader-kadernya ada di parlemen dan berwenang menyetujui APBN. Kepentingan yang lebih bersifat pribadi, kelompok atau politis dari pada kepentingan masyarakat ini dapat membuat pengelolaan APBN disalahgunakan, bahkan sejak dalam proses perencanaan. Mereka sadar betul bahwa dengan jabatan dan wewenang yang dimilikinya, APBN dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberi keuntungan besar, baik politik maupun finansial. Akibatnya, kepentingan rakyat akan terkikis secara perlahan dari APBN.

Belanja bansos dalam APBN dan kepentingan pemilu

Selama ini, kebijakan belanja bansos mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa belanja bansos adalah *“pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan rakyat”*.

Resiko sosial adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bansos, akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondidi wajar.

Belanja bansos adalah pos dalam APBN yang paling rawan dicurangi atau disalahgunakan. Beberapa sebabnya:

Pertama, pengaturan yang mengikat pengelolaan belanja bansos masih minimalis dalam beberapa hal. Misalnya dalam hal laporan pertanggungjawaban belanja bansos. Peraturan Menteri Keuangan hanya menyebutkan bahwa pertanggungjawaban belanja bansos oleh kementerian terkait ke kementerian keuangan paling sedikit hanya memuat jumlah pagu bansos yang disalurkan, realisasi bansos yang telah disalurkan, dan sisa dana bansos yang disetorkan ke rekening kas umum negara dengan dilampiri bukti tanda terima dan berita acara serah terima penyaluran.

Kedua, belanja bansos lekat dengan program dan kegiatan yang bersifat populis. Hal ini tidak lepas dari tujuan penggunaan bansos yang memang populis, yaitu meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Sifat belanja bansos yang populis ini banyak disalahgunakan dengan diatasmakan program pribadi atau kelompok, baik secara langsung ataupun

tidak langsung. Misalnya, dalam pemberian bansos ada atribut yang identik dengan partai tertentu sehingga timbul kebiasaan dalam masyarakat, diberikan pada basis pendukung partai tertentu atau dibarengkan dengan kegiatan partai.

Ketiga, dana bansos semakin rawan dipolitisasi mengingat banyak menteri yang merupakan petinggi partai politik. Bahkan, banyak menteri yang telah terdaftar dalam daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif atau ikut konvensi calon presiden disalah satu partai politik. Padahal sebagai pihak yang mengepalai kementerian, wewenang menteri sangat besar yaitu sebagai pengguna anggaran di kementeriannya. Terlebih untuk belanja bansos, menteri berwenang untuk menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bansos di kementeriannya masing-masing.

Sudah banyak kasus yang terungkap bahwa sebenarnya, penerima bansos APBD adalah klan dari kepala atau pejabat daerah. Tidak hanya itu, penggunaannya pun tidak jelas dan jauh dari tujuan bansos dialokasikan, yaitu melindungi masyarakat dari resiko sosial. Maka tidak berlebihan apabila masyarakat juga mulai mewaspadaai anggaran bansos dalam APBN yang jumlahnya juga sangat besar.

Kebijakan belanja bansos di kementerian tahun 2011, 2012 dan 2013

APBN 2013 telah ditetapkan melalui UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN 2013. UU ini dapat dimaknai sebagai kerangka kebijakan anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2013. Dalam keppres No.37 tahun 2012 tentang rincian APBN 2013, total belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam belanja kementerian sebesar Rp 69.541.588.695.000,-. Belanja bansos dalam kementerian tahun 2013 mencapai 4% dari seluruh total belanja APBN 2013 yang mencapai Rp 1.683.011.103.699.000,-.

Anggaran belanja bansos yang tersebar pada 15 kementerian di tahun 2013 mengalami peningkatan dari anggaran belanja bansos tahun 2012 dan 2011. Berikut rincian dan perbandingannya:

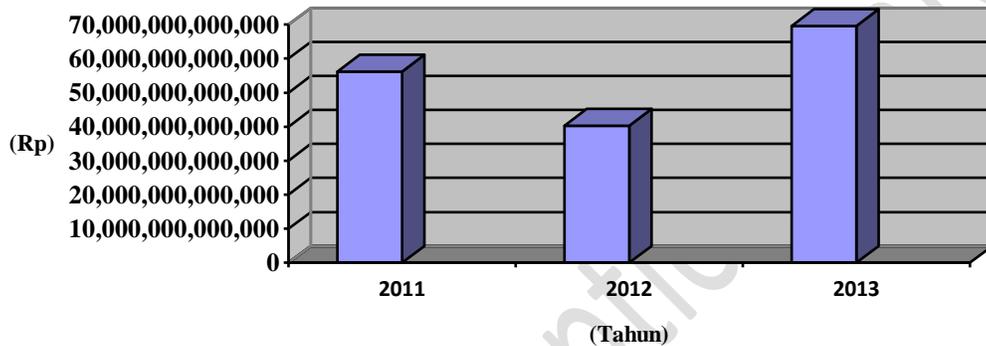
No.	Kementerian	Tahun (dalam ribu)		
		2013	2012	2011
1	Kementerian Sosial	3.351.468.074	2.735.547.273	2.284.320.640
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	727.996.019	784.662.050	398.207.100
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	446.581.500	165.740.000	112.382.187
4	Kementerian Perumahan Rakyat	2.224.360.000	1.218.334.400	-
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	608.656.333	-	-
6	Kementerian Pekerjaan Umum	3.953.417.017	3286920110	2.874.321.348
7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86.275.000	-	-
8	Kementerian Kehutanan	200.000.000	100.000.000	5.000.000
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.215.000	7.682.800	32.188.525
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22920294616	-	-
11	Kementerian Agama	11.312.042.045	5.559.902.259	8.107.020.092
12	Kementerian Pertanian	6.039.120.816	5.325.347.353	7.582.217.104
13	Kementerian Kesehatan	8.106.650.000	7.294.900.000	6.398.931.639
14	Kementerian Dalam Negeri	8.279.452.609	8.880.743.343	8.254.561.864
15	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.215.059.666	511.456.971	679.133.536
16	Kementerian Pendidikan Nasional	-	4.353.658.600	19.410.197.838
17	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	-	85.020.000	43.190.000
18	Kementerian Perdagangan	-	-	2.180.600
19	Kementerian Komunikasi dan Informasi	-	-	29.992.829
Jumlah Total Bansos (dalam ribu)		69.541.588.695	40.309.915.159	56.213.845.302

Sumber : Diolah dari data belanja bansos dalam rincian APBN TA 2011, 2012 dan 2013

Berdasarkan data di atas, peningkatan belanja bansos dari tahun 2011 hingga 2013 tidak terlihat. Besaran belanja bansos cukup naik turun tidak seperti pada tahun 2007, 2008 dan 2009 yang selalu meningkat walau tidak jauh berbeda setiap tahunnya.

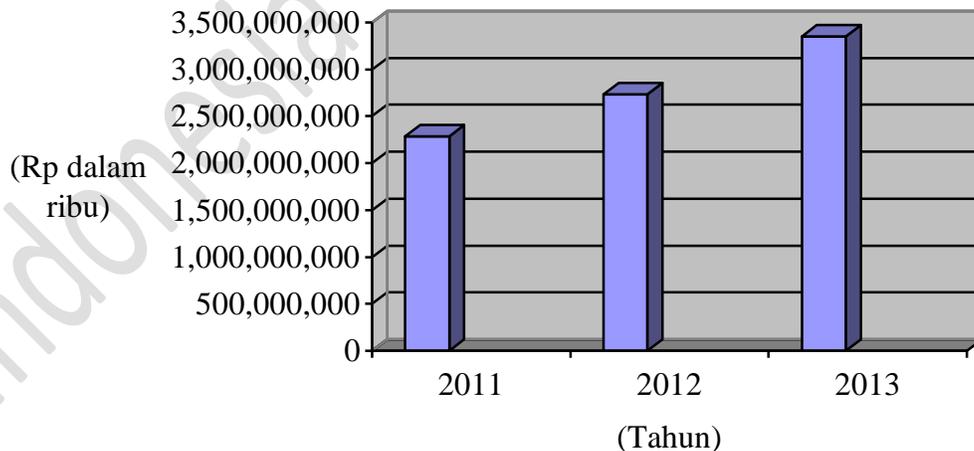
Namun pada tahun 2013, terjadi peningkatan belanja bansos yang cukup tajam daripada tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan terdapat pada kementerian yang menteri-menternya menjadi caleg pemilu 2014, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Grafik 1. Trend Belanja Bansos Kementerian dalam rincian APBN TA 2011, 2012 dan 2013¹



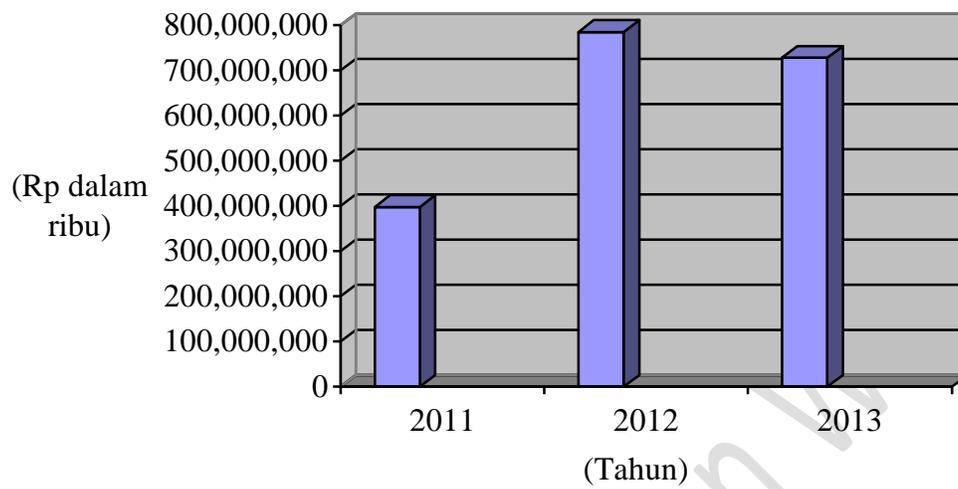
Sumber : Diolah dari data belanja bansos dalam rincian APBN TA 2011,2012 dan 2013

**Grafik 2.
Kementerian Sosial**

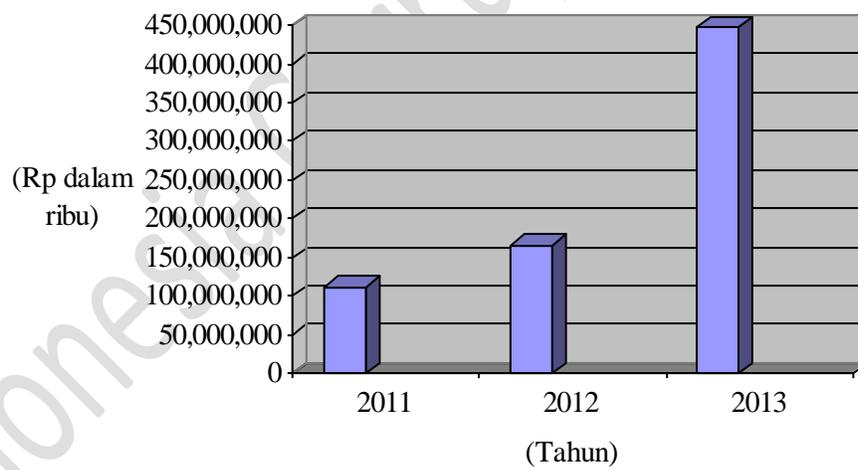


¹ Dalam Keppres No. 26 tahun 2010 tentang rincian APBN 2011, Keppres No. 32 tahun 2011 tentang rincian APBN 2012 dan Keppres No. 37 tahun 2012 tentang rincian APBN 2013.

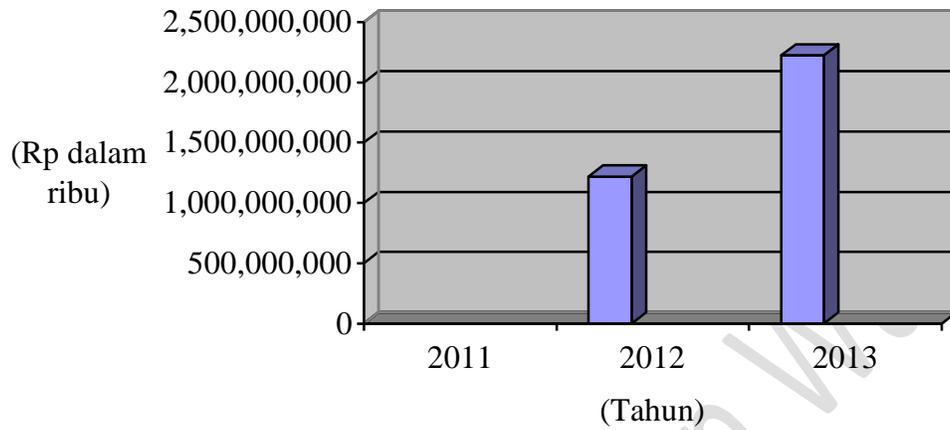
Grafik 3.
Kementerian Kelautan dan Perikanan



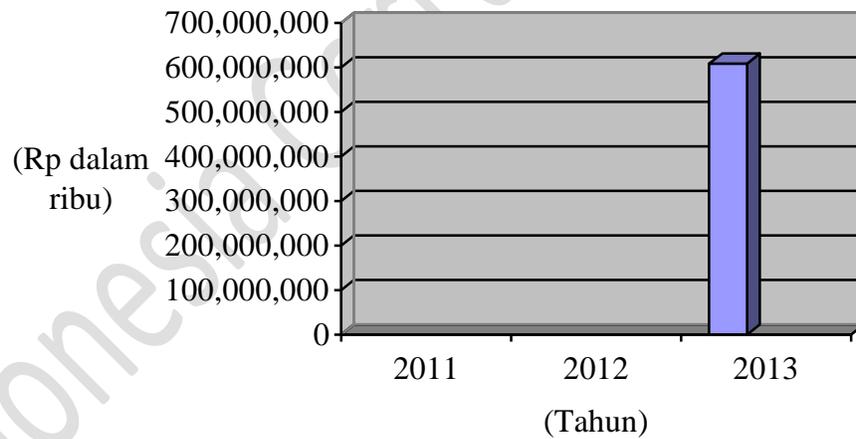
Grafik 4.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



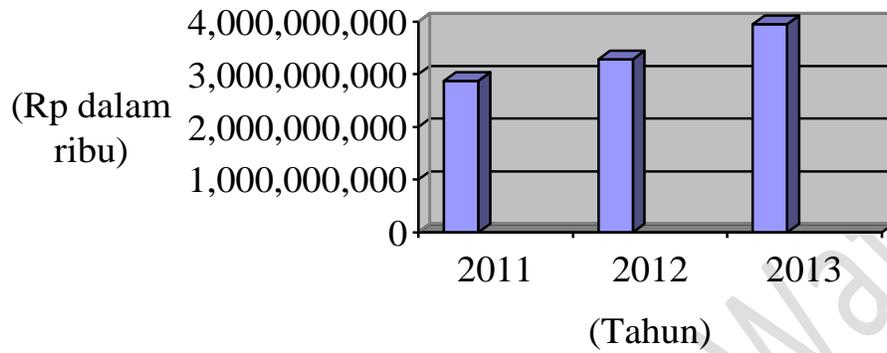
Grafik 5.
Kementerian Perumahan Rakyat



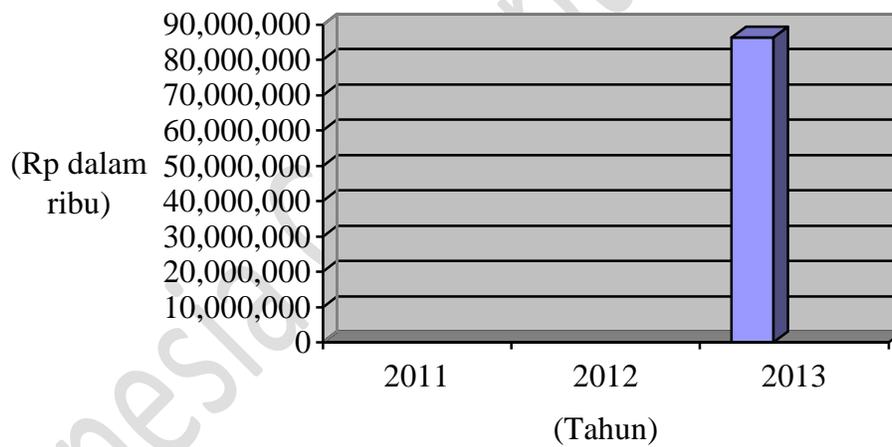
Grafik 6.
Kementerian Pemuda dan Olahraga



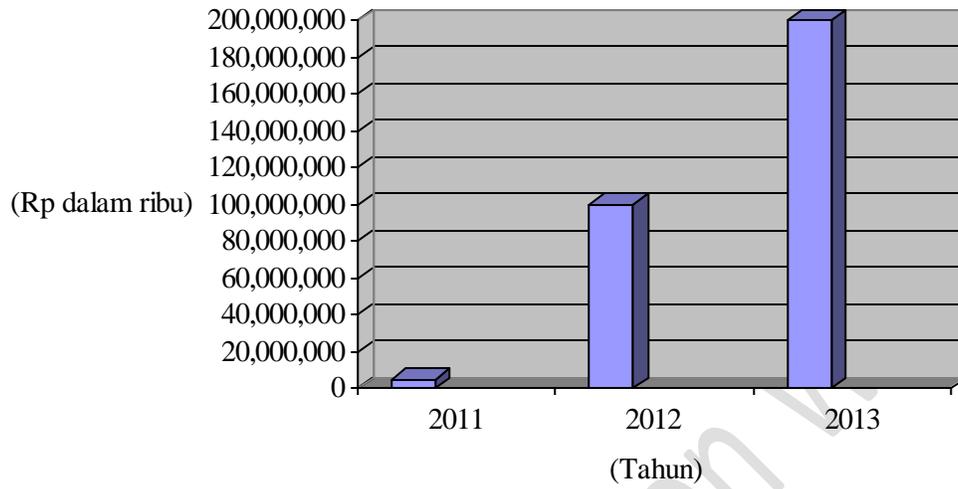
Grafik 7.
Kementerian Perumahan Rakyat



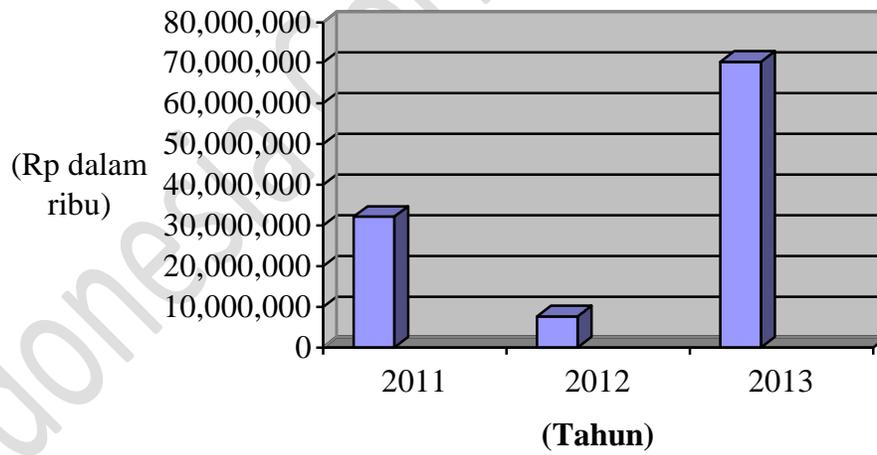
Grafik 8.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



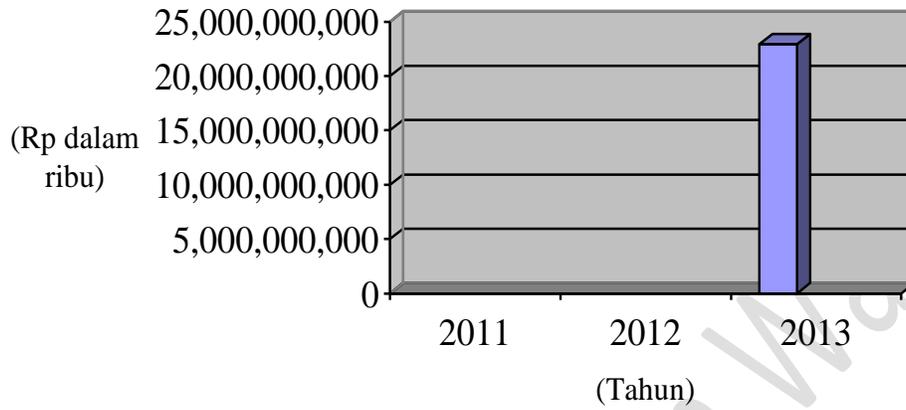
Grafik 9.
Kementerian Kehutanan



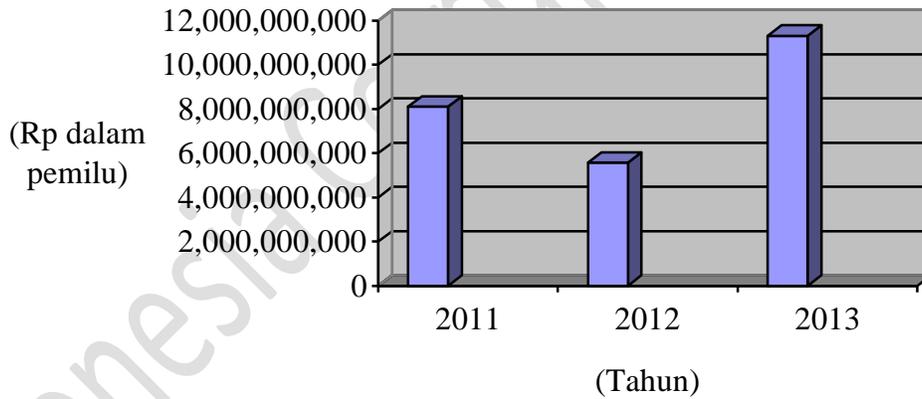
Grafik 10.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi



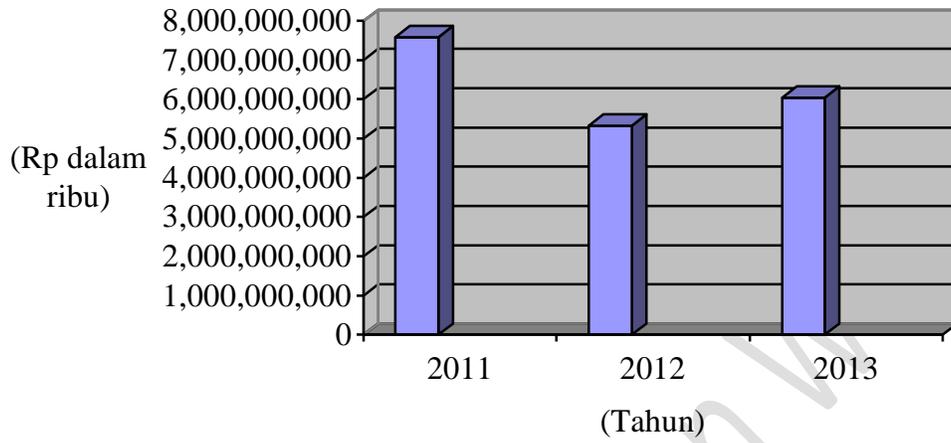
Grafik 11.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



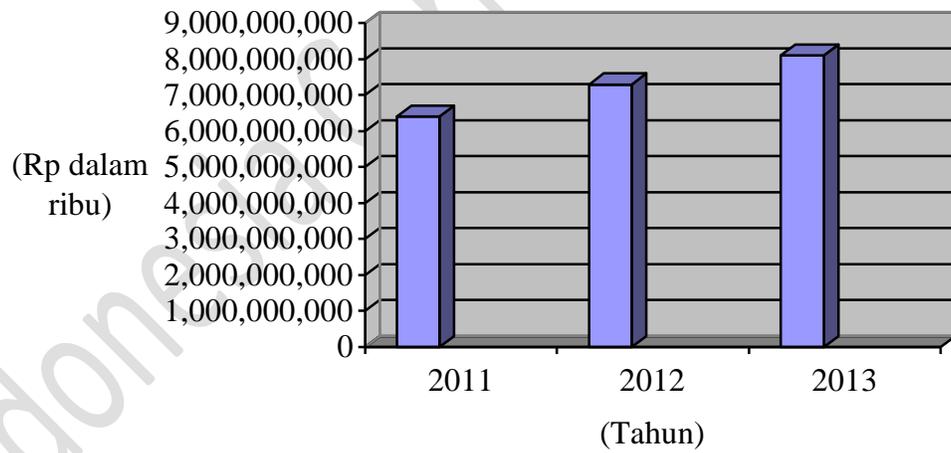
Grafik 12.
Kementerian Agama



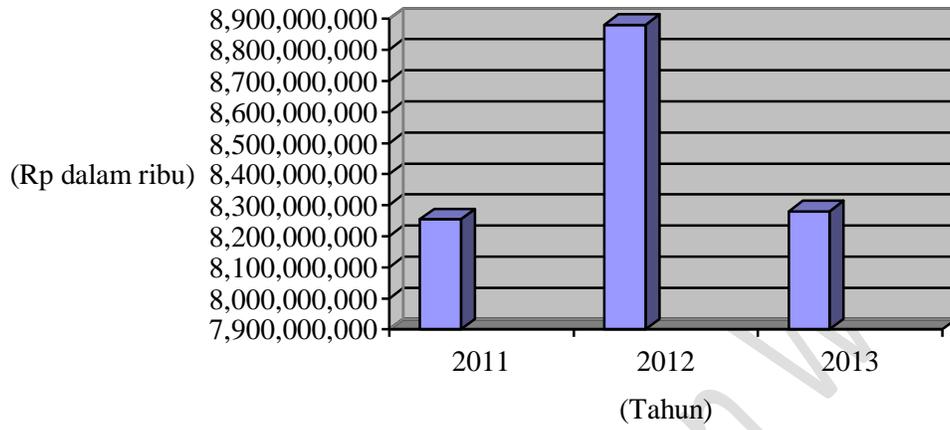
Grafik 13.
Kementerian Pertanian



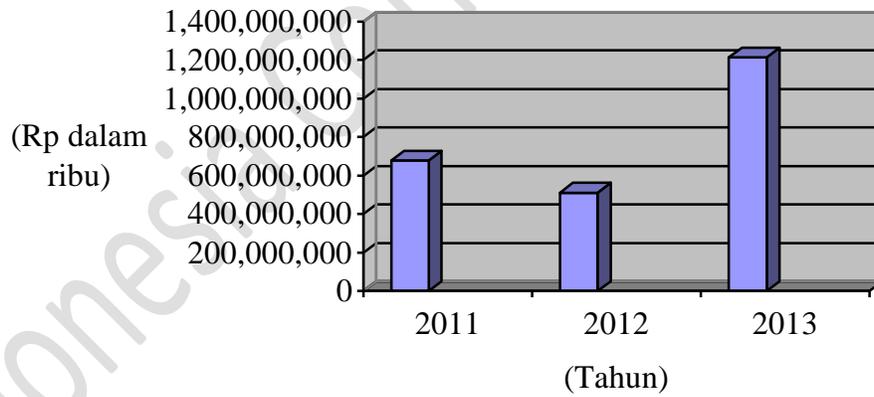
Grafik 14.
Kementerian Kesehatan



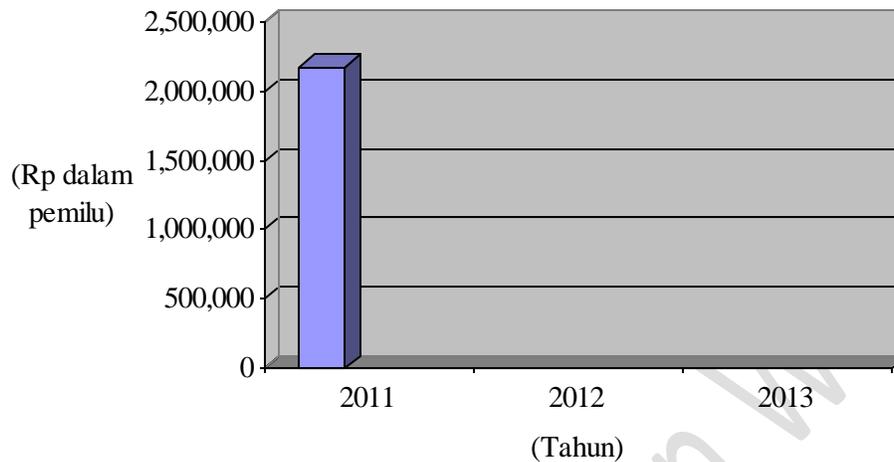
Grafik 15.
Kementerian Dalam Negeri



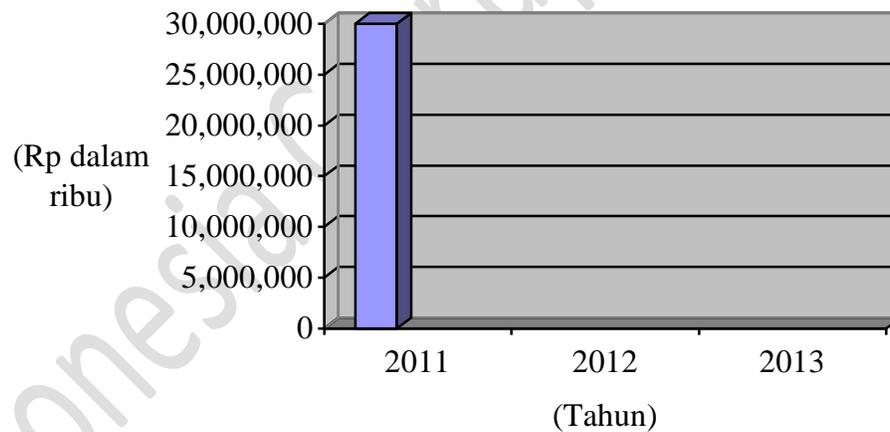
Grafik 16.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal



Grafik 17.
Kementerian Perdagangan



Grafik 18.
Kementerian Komunikasi dan Informasi



Sumber : Diolah dari data belanja bansos kementerian dalam rincian APBN TA 2011, 2012 dan 2013

Waspadai politisasi bansos kementerian

Peningkatan anggaran bansos kementerian tahun 2013 membuat kita harus mewaspadai adanya upaya politisasi bansos untuk kepentingan politik, karena:

Pertama, 2013 adalah tahun jelang pemilu 2014 yang dikhawatirkan menjadi tahun pengumpulan dana pemenangan pemilu oleh berbagai pihak, termasuk lewat membajak APBN.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pemilu legislatif 2014 yang 10 diantaranya menjabat sebagai menteri aktif. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Menteri

Perhubungan E. E. Mangindaan, Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Kesepuluh menteri itu berasal dari 4 partai berbeda. Amir Syamsudin, Jero Wacik, Syarifudin Hasan, dan E. E. Mangindaan berasal dari Partai Demokrat, Tifatul Sembiring dan Suswono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhaimin Iskandar dan Helmy Faishal Zaini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, ada 3 menteri yang sejauh ini telah banyak diberitakan hendak menjadi calon presiden, yaitu: Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Bahkan, Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan saat ini tengah sibuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Walau dalam kementerian menteri-menteri peserta konvensi capres ini tidak terdapat anggaran dana bansos, pos anggaran lainnya pada kementerian masing-masing patut diawasi.

Sementara itu, modus penyalahgunaan belanja bansos meliputi:

- Program atau kegiatan yang tidak jelas dan berkelanjutan. Penggunaan dana bansos seharusnya didasarkan pada asas efektif dan efisien. Lebih dari itu, untuk menekan dan tidak mengulang kegiatan dan sasaran yang sama, belanja bansos seharusnya didesain untuk mendanai program yang berkelanjutan. Nyatanya, bentuk program belanja bansos tidak didesain dengan efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Belanja bansos diberikan kepada individu atau kelompok yang merupakan basis pendukung menteri atau partai politik tertentu. Belajar dari penyalahgunaan penggunaan belanja bansos di daerah, belanja bansos nyatanya banyak diberikan pada basis masyarakat atau bahkan klan tertentu dengan diwarnai kepentingan politis, baik untuk mengambil dana bansos atau mendapat dukungan masyarakat.
- Disertai dengan upaya membangun popularitas pribadi dan kampanye terselubung. Modus ini secara administrasi bisa saja tidak menyalahi aturan. Namun, akan menimbulkan suatu kebiasaan di mata penerima dan masyarakat umum lainnya. Biasanya, modus ini akan disertai dengan penggunaan atribut yang cenderung identik dengan partai politik tertentu dan terlalu menonjolkan sosok menteri sebagai pemberi belanja bansos.

Hal-hal diatas perlu diwaspadai terlebih lagi banyak menteri yang tengah mengejar jabatan wakil rakyat atau presiden di pemilu mendatang. Apabila ini terjadi, tujuan mulia dari bansos tidak akan terwujud. Akhirnya, bansos hanya menjadi instrumen pihak-pihak tertentu untuk pengumpulan modal politik, menggiring suara rakyat dalam pemilu, atau kemenangan pemilu. Menghindari masyarakat dari terjadinya resiko sosialpun hanya sekedar wacana.

Simpulan dan Rekomendasi

Atas dasar-dasar diatas, maka ICW mendesak :

Pertama, kementerian keuangan melakukan pengawasan serius terhadap penggunaan belanja bansos 15 kementerian.

Kedua, BPK segera melakukan proses audit investigatif terhadap belanja bansos pada APBN.

Ketiga, DPR dan pemerintah menyusun anggaran berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada aspek kinerja, efisien dan efektif.

Keempat, menteri selaku pengguna anggaran belanja dana bansos tidak menggunakan belanja dana bansos untuk kepentingan pemilu, baik memanipulasi penerimaan atau menggunakannya dengan menimbulkan kebiasaan, antara belanja bansos dan modal pencitraan diri atau partai politiknya.

Kelima, DPR dengan fungsi penganggaran dan pengawasannya harus mengawasi proses anggaran agar lebih memihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pada kelompok tertentu.

Keenam, dalam upaya meminimalisir politisasi dan penyimpangan dana bansos maka penting untuk mengembalikan kebijakan bansos sebagai kerangka program kementerian yang mengacu pada prinsip efektif dan efisien.

Indonesia Corruption Watch

Lampiran : Rincian Belanja Bansos APBN Tahun Anggaran 2013

Kementerian	Unit	Fungsi	Program/ Kegiatan	Bansos (ribu rupiah)	Jumlah (ribu rupiah)
Kementerian Sosial	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Perlindungan Sosial	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	88,300,000	3,351,468,074
			Pelestarian Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	8,944,504	
			Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan	222,320,000	
			Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	27,091,800	
			Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	96,367,820	
	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Perlindungan Sosial	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	110,199,647	
			Pelayanan Sosial Lanjut Usia	89,420,800	
			Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	209,314,490	
			Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	7,654,000	
			Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	8,389,550	
	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial	Asuransi Kesejahteraan Sosial	15,600,000	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	124,207,623	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	70,912,500	
			Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	25,075,340	
			Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	2,247,670,000	
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditjen Perikanan Tangkap	Ekonomi	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	300,000,000	727,996,019
	Ditjen Perikanan Budidaya	Ekonomi	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	260,000,000	
	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ekonomi	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	75,000,000	
	Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	71,715,400	
			Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	21,280,619	

Kementerian Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah	Kementerian Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah	Ekonomi	Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3,835,000	446,281,500
			Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan	9,230,000	
			Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Perikanan dan Peternakan	6,728,000	
			Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan	2,761,000	
			Pemberdayaan Usaha KUKM di iBidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	21,000,000	
			Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	120,000,000	
			Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM	51,587,500	
			Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran UMKM	202,000,000	
			Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM	2,550,000	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam SDM KUMKM	10,000,000	
			Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM	900,000	
			Perluasan KUR	9,460,000	
			Pengembangan Restrukturisasi Usaha	180,000	
			Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis	1,200,000	
			Pengembangan Fasilitasi Investasi UKMK	1,600,000	
			Pengembangan Sistem Bisnis	850,000	
			Penelitian Koperasi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah	400,000	
			Penelitian Sumber Daya Koperasi dan UKM dalam Peningkatan Ekonomi Kawasan	2,000,000	
Kementerian Perumahan Rakyat	Kementerian Perumahan Rakyat	Perumahan dan Fasilitas Umum	Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus	175,000,000	2,224,360,000
			Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	300,000,000	
			Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	1,644,360,000	

			Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	105,000,000	
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pariwisata dan Budaya	Pemberdayaan Organisasi Olahraga	10,000,000	608,656,333
			Pembinaan Olahraga Prestasi	354,460,000	
		Pendidikan	Pengembangan Tenaga Kepemudaan	3,987,000	
			Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	916,000	
			Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	1,660,000	
			Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	15,024,250	
			Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	1,250,000	
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	42,752,500	
			Pengembangan Kepramukaan	40,000,000	
			Peningkatan Kapasitas Pemuda	1,037,500	
			Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda	1,112,750	
			Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	4,523,000	
			Pengembangan Olahraga Pendidikan	900,000	
			Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	109,000	
			Pengembangan Sentra Keolahragaan	17,260,000	
			Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	44,110,000	
			Pengembangan Promosi dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	34,866,400	
			Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga	380,000	
			Pengembangan Pembibitan Olahragawan	30,082,933	
			Pengembangan Tenaga Keolahragaan	4,225,000	
Kementerian Pekerjaan Umum	Ditjen Cipta Karya	Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengembangan Infratraktur Permukiman	317,990,000	3,953,417,017
		Perumahan dan Fasilitas Umum	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Pemberdayaan Komunitas Permukiman)	1,552,802,017	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Infratraktur Permukiman (Penyediaan Air Minum)	345,625,000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Infratraktur Permukiman (Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya)	1,737,000,000	

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata dan Budaya	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	86,275,000	86,275,000
Kementerian Kehutanan	Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Pelayanan Umum	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	200,000,000	200,000,000
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Ekonomi	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	45,750,000	70,215,000
	Ditjen Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Ekonomi	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	23,000,000	
	Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perumahan dan Fasilitas Umum	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	240,000	
	Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Perumahan dan Fasilitas Umum	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1,225,000	
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Jenderal	Pendidikan	Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Asia Tenggara	1,454,667	22,920,294,616
			Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas	182,460,000	
			Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	136,897,699	
	Ditjen Pendidikan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB	450,050,763	
			Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	1,415,997,425	
			Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	2,463,249,800	
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar	43,018,200	
			Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Teknik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar	5,584,149,312	

Ditjen Pendidikan Tinggi	Pendidikan	Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama	10,500,000
		Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	2,300,524,000
		Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan	144,118,600
		Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi	4,939,500
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal	Pendidikan	Pelayanan Layanan Paud	568,947,000
		Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	120,530,000
		Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	859,768,690
		Penyediaan Layanan Pendidik Masyarakat	218,198,100
		Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu Paud-NI	59,466,940
Badan Penelitian dan Pengembangan	Pendidikan	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional	1,200,000
		Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	501,680,220
		Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan	6,524,000
Ditjen Pendidikan Menengah	Pendidikan	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	1,990,969,418
		Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	2,795,721,500
		Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB	216,454,400
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Menengah	89,960,000
		Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Didik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah	1,884,362,716
Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu	Pendidikan	Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan	200,000
		Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang Paud, Dikdas, Dikmen dan Dikti	528,585,000
		Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	64,129,600
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDMP dan PMP	119,755,266

			Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	390,000	
	Ditjen Kebudayaan	Pendidikan	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	61,984,500	
			Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	30,702,800	
			Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	63,404,500	
Kementerian Agama	Sekretariat Jenderal	Pelayanan Umum	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	7,170,000	11,312,042,045
			Pembinaan Administrasi Perencanaan	10,000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	100,000	
			Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	25,000	
	Agama	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	10,869,756		
		Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama	467,927		
		Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	100,000		
	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	Agama	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakal	30,715,941	
			Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat	24,367,175	
			Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	168,056,024	
			Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	97,987,067	
	Ditjen Pendidikan Islam	Pendidikan	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	9,945,509,865	
			Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	266,411,340	
			Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	94,009,051	
			Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	322,012,686	
			Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1,662,850	
	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Agama	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	96,379,310	
Pendidikan		Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	77,311,261		

			Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	1,872,500	
	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	Agama	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	31,813,789	
		Pendidikan	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	21,696,299	
	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Pelayanan Umum	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	46,000	
		Agama	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	28,739,360	
		Pendidikan	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	29,241,423	
			Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidik Tinggi Agama Hindu	22,385,056	
	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	Agama	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	6,850,960	
		Pendidikan	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	20,999,405	
			Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidik Tinggi Agama Buddha	5,232,000	
Kementerian Pertanian	Sekretariat Jenderal	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggan dan Pelaksanaan Humas di Bidang Pertanian	54,416,647	6,039,120,816
	Ditjen Tanaman Pangan	Pelayanan Umum	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	73,184,790	
		Ekonomi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	2,137,589,134	
	Ditjen Hortikultura	Pelayanan Umum	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Hortikultura	30,000,000	
		Ekonomi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	5,000,000	
	Ditjen Perkebunan	Ekonomi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	925,000	
	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ekonomi	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	229,280,000	
	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Pelayanan Umum	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Pemasaran Hasil Pertanian	20,000,000	

	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Pelayanan Umum	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	79,980,000	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	38,285,900	
		Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	3,023,677,500	
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Ekonomi	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	10,870,845	
		Pendidikan	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	7,200,000	
	Badan Ketahanan Pangan	Pelayanan Umum	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	15,906,000	
Ekonomi		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	312,805,000		
Kementerian Kesehatan	Ditjen Bina Upaya Kesehatan	Pelayanan Umum	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (Jampersal)	1,559,600,000	8,106,650,000
			Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	
		Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)		5,539,200,000	
	Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kesehatan	Penyehatan Lingkungan	7,850,000	
Kementerian Dalam Negeri	Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perumahan dan Fasilitas Umum	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)	7,968,743,411	8,279,452,609
			Fasilitasi { emberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	310,709,198	
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Pelayanan Umum	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitas pemberdayaan masyarakat daerah	21,000,000	1,215,059,666
			Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi sumber daya hayati di daerah tertinggal	8,095,000	
			Pengembangan kebijakan, koordunasi dan fasilitasi kesehatan dasar, lanjutan daerah tertinggal	26,393,685	
			Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan kecukupan nutrisi di daerah tertinggal	600,000	

		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan ketrampilan di daerah tertinggal	18,400,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan teknologi dan inovasi di daerah tertinggal	2,800,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	24,600,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	109,500,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	87,977,770
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal	143,411,019
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	53,000,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	271,850,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur UMKM dan koperasi daerah tertinggal	8,640,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal	12,826,172
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi usaha daerah tertinggal	4,500,000
		Pengembangan jaringan CSR	4,000,000
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal	5,200,000

		Pengembangan kebijakan pengelolaan komoditas unggulan	211,131,020	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal	1,200,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi fasilitasi penguatan kelembagaan pemda tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik	15,000,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masy. daerah tertinggal	3,300,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga sos dan bud daerah tertinggal	1,300,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendidikan luar sekolah daerah tertinggal	1,600,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi ketenagakerjaan di daerah tertinggal	1,000,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat pertumbuhan daerah tertinggal	15,810,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan	41,800,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	82,750,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah pasca bencana alam dan sosial di daerah tertinggal	2,400,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal	32,145,000	
		Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi sumber daya mineral, energi dan lingkungan hidup di daerah tertinggal	2,830,000	
Total Jumlah Bansos (ribu rupiah)			69,541,288,695	69,541,288,695